

Ketertiban Ditengah Pembantaian: Perjuangan Kepolisian Madiun Raya Sekitar Masa Pemberontakan 1948

Iqbal Rizki Sucahyo^{1✉}, Septian Dwita Kharisma², Ilham Putra Pratama³, Annisaa Khansa Labibah⁴, Aulia Rahmad Saleh Siregar⁵, Shafira Daniar Rahma Herlamb⁶, Karima Mahardika⁷, Adinda Mella⁸, Mochammad Saddam Agta Donggo⁹
(1,4,5,6,7,8,9) Departemen Sejarah Universitas Negeri Malang
(2) Komunitas Pelestari Sejarah Madiun Raya,
(3) Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Sebelas Maret

✉ Corresponding author

[iqbal.rizki.2307326@students.um.ac.id]

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran kepolisian, khususnya Mobile Brigade (Brimob), dalam menangani Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Melalui metode historis, penelitian ini mengkaji dokumen arsip dan laporan resmi Kepolisian Republik Indonesia serta literatur terkait dengan Pemberontakan Madiun 1948. Hasil menunjukkan bahwa kepolisian memainkan peran strategis dalam operasi militer bersama satuan lainnya untuk menumpas pemberontak dan memulihkan stabilitas di Madiun. Pemindahan markas Brimob ke Madiun menjadi langkah penting dalam memperkuat pengamanan. Pasca-pemberontakan, reorganisasi kepolisian dilakukan untuk menanggulangi dampak berupa korban jiwa, trauma anggota, dan kekurangan personel. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga keamanan dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman ideologi yang bertentangan dengan dasar negara.

Kata Kunci: *Pemberontakan Madiun, PKI, Kepolisian, Stabilitas Keamanan.*

Abstract

The purpose of the research is to find out the role of the police, especially the Mobile Brigade (Brimob), in handling the PKI Rebellion in Madiun in 1948. Through the historical method, this research examines archival documents and official reports of the Indonesian National Police as well as literature related to the 1948 Madiun Rebellion. The results show that the police played a strategic role in military operations with other units to suppress the rebels and restore stability in Madiun. The relocation of the Brimob headquarters to Madiun was an important step in strengthening security. Post-insurgency, a reorganization of the police force was carried out to cope with the impact in the form of casualties, member trauma, and personnel shortages. This incident shows the importance of synergy between security institutions in maintaining national stability amidst the threat of ideologies that are contrary to the basis of the state.

Keyword: *Madiun Affair, PKI, Police, Security Stability.*

PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan sempat terjadi pemberontakan dan perlawanan dari rakyat Indonesia sendiri yang memiliki ideologi dan sudut pandang berbeda dalam menjalankan pemerintahan misalnya pemberontakan yang Partai Komunis Indonesia lakukan di Madiun. Dibawah komando Musso Partai Komunis Indonesia berusaha mengambil alih wilayah Madiun dan berencana menjadikannya wilayah kuasa. Rencana pemberontakan itu berhasil direalisasikan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 18 september 1948 (Afrianto, 2024).

Sementara setahun sebelumnya telah terjadi juga peristiwa yang mengganggu keamanan. Adanya tekanan dari pihak luar yang ingin Republik Indonesia hancur. Peristiwa Agresi Militer I

oleh Belanda menargetkan wilayah Jawa bagian timur sebagai target utama. Kedua hal tersebut mengakibatkan banyak kekuatan pemerintahan dalam keadaan siaga (Fahrurodji, 2017).

Kepolisian dan pusat pemerintahan di wilayah Jawa bagian timur pun terkena dampak berupa pemindahan pusat pemerintahan sampai perombakan secara besar-besaran struktur organisasi dalam kepolisian. Kedua hal itu menjadi dua kekuatan dan benteng terakhir dalam menahan pemberontakan yang dikepalai bangsa sendiri. Selain itu, Brigadir Mobile (BriMob) yang sudah siaga sejak agresi militer I turut ikut serta dalam mengamankan keadaan yang sangat kacau di Kota Madiun (Kamal, 2018).

Dalam keadaan terpojok kepolisian dipaksa harus tetap profesional dan tenang dalam menanggapi suasana kacau yang ada di depan mata. Meskipun banyak anggota kepolisian yang menjadi korban tapi keamanan dan kenyamanan rakyat harus tetap terjaga dan dikembalikan secepat mungkin. Pemberontakan yang berlangsung selama setengah bulan yang menimbulkan kengerian bagi rakyat harus segera dibereskan. Pelaku utama serta orang-orang yang terkait dalam pemberontakan harus dibereskan dan dimusnahkan (Nugraha dan Winarti, 2018).

Kepolisian menjadi bidak utama pemerintah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di Madiun. Syukur saja pihak kepolisian berhasil mengembalikan situasi seperti semula. Meskipun mendapatkan serangan lebih lanjut berupa agresi militer II oleh Belanda yang meneror kota Madiun dengan tembakan-tembakan yang malah menimbulkan kekacauan lebih lama. Maka, judul 'Ketertiban ditengah Pembantaian: Perjuangan Kepolisian Madiun Raya Sekitar Masa Pemberontakan 1948' sangat menggambarkan kondisi yang sangat kacau di Madiun yang berhasil diselesaikan dengan ketenangan dan sikap kooperatif dari masyarakat sendiri yang tidak bersikap berlebihan yang dikhawatirkan malah menimbulkan keributan dan kepanikan lebih lanjut (Soedarmo, 2014).

Adapun penelitian terdahulu yaitu tentang Gatot Subroto: Peran Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI Di Madiun Tahun 1948 (Kamal, 2018), Kiprah Divisi Siliwangi Dalam Menghadapi Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948 (Nugraha & Winarti, 2018) dan Histografi Perjuangan Pasukan Siliwangi Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949 (Iryana & Mustofa, 2021).

Penelitian dengan judul 'Ketertiban di tengah Pembantaian: Perjuangan Kepolisian Madiun Raya Sekitar Masa Pemberontakan 1948' ini diperlukan untuk membahas lebih dalam peran kepolisian dalam situasi yang sangat krusial sehingga akan tampak peran lain kepolisian dalam narasi sejarah yang sering diabaikan. Kajian ini menghadirkan sudut pandang baru terkait peran kepolisian dalam situasi yang kritis dan penuh kekacauan serta diharapkan penelitian ini bisa mengisi kekosongan literature sejarah tentang peran kepolisian dalam mengatasi pemberontakan Madiun 1948 ditengah sumber yang terbatas dalam kajian sejarah nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode historis untuk menganalisis peran kepolisian Negara Republik Indonesia selama periode kritis bangsa, yang meliputi *Eerste Politinale acties* (Agresi Militer Belanda I) dan Pemberontakan PKI 1948. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschlak, 2008) terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Moustakas, 1990; Renier, 1961). Melalui metode Historis, penelitian bertujuan untuk mengungkap dinamika kompleks keamanan negara, stabilitas politik, dan ketertiban umum yang melibatkan polisi Madiun dalam masa yang penuh gejolak.

Sumber Primer menjadi dasar utama dalam penelitaian ini. Dokumen dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjadi data sentral yaitu, surat keputusan Kepala Polisi Negara (No. Pol.4/32/44/Sek.) yang menetapkan Madiun sebagai ibu kota sementara Jawa Timur dan memindahkan markas Brimob ke Blitar. Selain itu, laporan yang dibuat oleh Inspektur Polisi Kelas II, M.A. Soebroto, dari Djawatan Polisi Negara Bagian Pengusut Kedjaatan memberikan penjelasan rinci tentang tantangan situasional yang dihadapi polisi dalam menjaga ketertiban umum dan menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh PKI dan FDR. Keputusan reorganisasi polisi (No. Pol.55/30/1/Sek.) juga memberikan wawasan mengenai perubahan struktural dan penyesuaian strategis dalam tubuh kepolisian pasca-pemberontakan.

Ketiga dokumen tersebut dianalisis secara kritis untuk mengungkapkan aspek politik, sosial, dan keamanan di Madiun selama periode tersebut, termasuk melakukan kritik sumber untuk menguji validitas melalui kritik eksternal dan internal, memastikan keaslian dan kredibilitas arsip dan dokumen pendukung. Proses ini diikuti oleh interpretasi, atau analisis historis, untuk mensintesis fakta dan merekonstruksi realitas masa lalu, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi pemahaman yang komprehensif. Akhirnya, penelitian ini menggunakan teknik penulisan sejarah untuk menyajikan temuan secara kronologis, mengevaluasi secara kritis hubungan timbal balik antara peran polisi, negara, dan masyarakat dalam episode penting sejarah Indonesia ini, dengan menekankan pada dampak signifikan terhadap kerangka organisasi dan operasional Kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kepolisian Republik Indonesia

1. *Tokubetsu Kaisatsu Tai*

Tokubetsu Kaisatsu Tai merupakan salah satu pasukan hasil didikan Jepang ketika berada di Indonesia, pasukan ini dibentuk dengan tujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya yang pada saat itu Jepang membutuhkan pasukan sebanyak-banyaknya agar bisa memenangkan perang (Beridiansyah, 2023). *Tokubetsu Kaisatsu Tai* menjadi salah satu pasukan yang nantinya akan menjadi bagian jadi Brimob atau Brigade Mobile, pembentukan *Tokubetsu Keisatsu Tai* dilakukan oleh Jepang pada dasarnya adalah upaya untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah situasi perang yang semakin menguntungkan Sekutu.

Dengan melakukan pelatihan kepada pemuda pribumi Jepang tidak hanya mendapatkan tenaga tambahan tetapi juga berusaha mengalihkan potensi perlawanan rakyat menjadi kekuatan yang mendukung pendudukan. Dengan mendirikan pusat pelatihan di berbagai daerah, Jepang berusaha menciptakan pasukan yang bermobilitas tinggi dan mahir dalam pertempuran. Jepang mendirikan pusat pelatihan di Jawa-Madura dan Sumatera, untuk wilayah Jawa-Madura *Tokubetsu Kaisatsu Kai* berpusat di Jakarta (Lebra, 1988).

Di Jawa Timur tepatnya di Surabaya terdapat tempat untuk calon pasukan *Tokubetsu Keisatsu Tai* yang akan melakukan pelatihan, pasukan yang sudah dilatih memiliki keterampilan yang lebih lengkap daripada polisi biasanya dengan diberikannya fasilitas persenjataan yang lebih lengkap. Pada tahun 1944 Jepang berhasil membentuk *Tokubetsu Keisatsu Tai* di setiap wilayah keresidenan Jawa-Madura dengan jumlah pasukan sekitar 60 hingga 200 orang di setiap Kompi (Beridiansyah, 2023, hal 15).

Salah satu orang yang terpilih untuk menjadi bagian dari pasukan *Tokubetsu Kaisatsu Tai* yaitu Moekari menyebutkan bahwa untuk menjadi bagian dari pasukan ini tidaklah mudah, mereka yang mendaftar harus memiliki sifat disiplin dan juga memiliki fisik yang kuat karena pada saat awal mendaftar mereka akan melakukan test kesehatan dan juga fisik (Kasdi, 2010). Setelah lolos tahap awal mereka akan tinggal di asrama dimana kehidupan mereka akan sangat teratur mulai dari jadwal makan hingga jatah rokok yang akan mereka dapatkan setiap minggunya. Di asrama mereka diajarkan untuk menjalani pelatihan militer yang sangat ketat dan intensif. Selain latihan fisik seperti lari jarak jauh, mereka juga dilatih dalam berbagai taktik perang, penggunaan senjata, dan bertahan hidup dalam kondisi ekstrem. Kurikulum pelatihan yang diadopsi dari militer Jepang ini bertujuan untuk membentuk pasukan yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga memiliki disiplin tinggi, kecerdasan taktis, dan siap menjalankan segala tantangan yang akan dihadapi.

2. Pasca Kemerdekaan

Pada tanggal 21 Agustus 1945, *Tokubetsu Keisatsu Tai* secara resmi menyatakan kesetiannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bergabung di bawah pimpinan Moehammad Jasin. Dibalik pernyataan tersebut sebenarnya terjadi situasi yang sulit ketika Jepang melucuti *Heiho* dan juga PETA setelah proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 tetapi Jepang tidak melucuti pasukan *Tokubetsu Keisatsu Tai* yang berjumlah 100 orang (Yauwerissa, 2013). Kemudian para pemimpin *Tokubetsu Kaisatsu Tai* beserta pasukannya melakukan diskusi untuk memutuskan bagaimana nasib dari *Tokubetsu Kaisatsu Tai*

kedepannya, dalam sebuah pertemuan di Surabaya yang dilakukan oleh Toketaiye, Soeratmin dan S. Prawirosoedirdjo menyatakan bahwa Tokubetsu Keisatsu Tai mengambil keputusan strategis untuk beralih mendukung Republik Indonesia.

Tidak hanya mengubah nama menjadi Polisi Istimewa tetapi juga mengganti simbol-simbol Jepang dengan simbol nasional Indonesia, sebagai pasukan yang paling siap tempur mereka berperan penting dalam mengamankan kemerdekaan Indonesia dengan melucuti senjata pasukan Jepang (Danoekoesomo, 1997). Moehammad Jasin yang pada saat itu menjabat sebagai Inspektur Polisi Tk. 1 mengadakan pertemuan bersama Inspektur I Soetardjo, Komandan Polisi Abidin, dan Komandan Polisi Musa. Mereka membahas mengenai kondisi situasi di Surabaya dimana pada akhirnya mereka sepakat untuk membentuk Polisi Republik Indonesia, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa keputusan yang akan dilaksanakan di keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 Agustus 1945.

Serta mengadakan apel pagi di markas Polisi Istimewa serta memproklamasikan atau menyatakan bahwa Polisi Istimewa resmi menjadi bagian dari Polisi Republik Indonesia (Kasdi, 1986). Setelah proses penyatuan Polisi Republik Indonesia kemudian melakukan penyerbuan-penyerbuan kepada beberapa markas Jepang yang masih ada di Indonesia seperti markas Kampetai dan selanjutnya PRI juga menyerbu persenjataan Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu, Gubeng Surabaya (Jasin, 2010). Moehammad Jasin memimpin pasukan Polisi Republik Indonesia (PRI) dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Surabaya. Berbekal persenjataan yang berhasil dirampas, Jasin dan pasukannya terlibat dalam berbagai pertempuran sengit termasuk dalam peristiwa bersejarah seperti Insiden Bendera di Hotel Yamato dan Pertempuran 10 November 1945.

3. Mobrig

Pasca kemerdekaan PRI terus berupaya menjaga solidaritas untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, beberapa pasukan juga ingin bergabung ke dalam PRI yang akhirnya dibentuklah Panitia Persiapan Konferensi di Madiun yang diketuai oleh Suparto (Suparmin, 1985). Konferensi tersebut diadakan pada 12 Mei 1946 yang bertujuan untuk mengorganisir perjuangan pasukan untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Setelah dibentuknya P3 terjadi peristiwa pada tanggal 27 Juni 1945, peristiwa tersebut adalah peristiwa penculikan Sjahrir, Dr. Darmasetiawan, dan Jenderal Mayor Sudibyo yang diketahui diculik di Solo (Danoekoesoemo, 1997).

Mendengar peristiwa tersebut diutuslah satu seksi pasukan yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Moedjoko yang kemudian dikomandani oleh Inspektur Polisi II Imam Bachri menuju Madiun (Danoekoesoemo, 1997). Pasukan tersebut diutus menuju Madiun karena Residen Soedirman memberikan informasi bahwa Sjahrir dan beberapa sandera lainnya dibawa ke Madiun, namun setelah pasukan dikirim ke Madiun mereka tak menemukan apa-apa. Sjahrir dan sandera lainnya dilepaskan pada tanggal 1 Juni 1946 kemudian kesatuan P3 Surabaya diutus untuk memburu pelaku penculikan, pasukan P3 dibagi menjadi beberapa bagian yang dipimpin oleh Soepardjo, Koesnadi, Abdul Rachman, Prawiro, Soebandi dan Moedjoko.

Di bawah komando Pembantu Inspektur Polisi I Soepardjo pasukan memiliki persenjataan lengkap termasuk kendaraan lapis baja, pasukan secara langsung melakukan pengejaran besar-besaran untuk menangkap para penculik. Para penculik yang berhasil ditangkap kemudian ditahan di Benteng Vredenburg dengan penjagaan ketat oleh pasukan P3 Jawa Timur. Setelah menyelesaikan tugasnya, pasukan P3 Jawa Timur kembali ke Mojokerto dan digantikan oleh Pasukan Polisi Istimewa Surabaya di bawah pimpinan Pembantu Inspektur Polisi II Imam Bachri. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kepolisian pemerintah memutuskan untuk membentuk satuan baru yang lebih modern.

Pilihan jatuh pada P3 yang telah memiliki pengalaman, P3 kemudian berganti nama menjadi Mobile Brigade (Mobrig) dan secara resmi didirikan pada 14 November 1946 (Suparmin, 1986 hal 244). MBB atau Mobile Brigade Besar Jawa Timur Jawa Timur yang dipimpin oleh Moehammad Jasin memainkan peran krusial dalam mengamankan Sidang Pleno KNIP di Malang pada 25 Februari 1947 (Alda, 1982). Tugas ini menjadi ujian perdana bagi satuan MBB mengingat situasi keamanan yang tidak stabil akibat penculikan sejumlah pejabat

kepolisian. Menghadapi situasi genting Moehammad Jasin segera mengambil langkah strategi, ia menggelar rapat koordinasi untuk merancang operasi penyelamatan.

Salah satu taktik yang digunakan adalah menyebarkan informasi palsu tentang jumlah pasukan MBB yang akan dikirim ke Malang, operasi ini berhasil menciptakan ketakutan di kalangan penculik dan akhirnya para sandera berhasil dibebaskan. Keberhasilan Moehammad Jasin dalam menangani situasi darurat di Malang tidak hanya membuahkan pengakuan atas kepemimpinannya tetapi juga membawa dampak positif bagi keamanan dan stabilitas wilayah. Pengangkatan Moehammad Jasin sebagai anggota KNIP dan kepala kepolisian Malang merupakan bentuk kepercayaan serta apresiasi pemerintah atas berhasilnya operasi tersebut (Suparmin, 1985 hal 234).

Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1961 Menteri Kepala Kepolisian Negara mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan tanggal 14 November sebagai Hari Jadi Mobile Brigade dan sekaligus meresmikan perubahan nama menjadi Brigade Mobil. Perubahan nama ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dan memberikan identitas yang lebih kuat bagi satuan kepolisian khusus ini.

Awal Mula Madiun Affair

Setelah pengumuman kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara yang baru merdeka ini menghadapi banyak masalah politik. Banyak partai politik mulai berperan aktif dalam pemerintahan dan kehidupan sosial, termasuk PKI yang memiliki pandangan komunisme untuk masyarakat Indonesia, diawali dengan jatuhnya kabinet Amir Sjarifudin dan lahirnya Front Demokrasi Rakyat. Dan kembalinya Musso ke Indonesia telah membangkitkan semangat PKI (Efimova, 2003), motivasi PKI dalam memulai gerakan ini adalah untuk meningkatkan pengaruh mereka dan menyatakan bahwa mereka mewakili kepentingan masyarakat pekerja dan petani. Sasaran jangka pendek adalah untuk menguasai pemerintahan daerah, sedangkan sasaran jangka panjang adalah menciptakan sebuah masyarakat komunis di Indonesia dengan mengubah landasan negara.

PKI melakukan berbagai macam propaganda anti pemerintah hingga adanya gerakan mogok kerja yang dilakukan para buruh, tujuan jangka panjang PKI adalah mengubah ideologi Pancasila menjadi Ideologi Komunis seperti Soviet, dan pengaruh Madiun cukup kuat, dilihat dari posisi geografisnya sangat strategis karena terletak di persimpangan lalu lintas. Sejak awal Revolusi, partai-partai FDR hampir selalu menjadi kekuatan yang paling dominan. Partai-partai ini didukung oleh serikat buruh yang kuat, serta memiliki banyak pengikut di kalangan penduduk desa, yang sangat responsif terhadap janji-janji terkait reformasi. FDR di Madiun dipimpin oleh Soemarsono, Soemarsono juga berperan sebagai pemimpin Pesindo dan Ketua BKPRI. FDR mengangkatnya sebagai ketua *Comite van Actie* di Madiun untuk melaksanakan Program Nasional (Poeze, 2011).

FDR di Madiun mulai menyebarkan suara radikal melalui radio BKPRI Gelora Pemuda, yang dioperasikan oleh Pesindo. Tindakan ini segera memicu ketegangan dengan pihak pemerintah, dan Soemarsono menyatakan bahwa FDR mempunyai dampak yang signifikan dibandingkan dengan partai-partai lain di Madiun, membuat Pimpinan FDR di Yogyakarta memutuskan Madiun sebagai pusat jika ada situasi darurat (Poeze, 2011). Dalam hal ini, FDR Madiun perlu diperkuat dengan kekuatan militer sebagai dukungan. Situasi semakin mendesak ketika kesatuan Siliwangi yang mendukung pemerintah memasuki Madiun. Penyerahan batalyon Angkatan Laut yang mendukung FDR di Nganjuk pada 13 September telah memperburuk situasi, hal ini menyebabkan Pasukan Pesindo dipindahkan dari posisi depan ke Madiun dan daerah sekitarnya, meskipun TNI mendesak mereka untuk kembali ke tempat semula,

Situasi di Madiun menjadi semakin tidak terkendali, dengan komunikasi antara FDR dan pasukan pemerintah yang semakin menegangkan. Pada tanggal 16 September, kesepakatan awal antara serikat pekerja lokal dan CPM (*Corps Polisi Militer*) dibatalkan setelah tuduhan dari PKI mengenai rencana penculikan terhadap pemimpin kiri. Pemogokan buruh berlanjut di bawah panji SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang menyebabkan CPM marah dan melepaskan tembakan ke udara (Poeze, 2011), maka peristiwa berikut sebenarnya adalah konflik antara pemerintah dan PKI karena keterlibatan massa yang tidak berdampak besar (Swift, 2010).

Peran Kepolisian dalam Madiun Affair



Gambar 1. Foto Patroli Kepolisian di Area Madiun tahun 1948

Sumber: Koleksi Indonesian Press Photo Service (IPPHOS), Dikelola oleh Laboratorium Sejarah Dewan Harian Daerah 45 Surabaya

Dalam peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, pada bulan Juli yang mana pada saat itu terdapat laporan bahwa terdapat konflik antara Brigade 29 yang merupakan pro-kiri di satu pihak dengan Brigade Mobil CPM di pihak lain. Dalam konflik ini, Brigade 29 melakukan patroli dan menampakkan diri di dekat tangsi CPM, Siliwangi dan Polisi Negara. CPM kemudian melarang adanya kegiatan patroli tersebut, yang kemudian hal tersebut menyebabkan kedua belah pihak terlibat dalam saling menyiapkan pasukan dan dilanjutkan dengan aksi tembakan-menembak. CPM menduga, FDR memiliki rencana untuk merebut kekuasaan. Pada tanggal 31 Juli dilakukan perundingan dengan semua pihak, yang mana perundingan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan suasana tenang (Poeze, 2011).

Soekarno yang merupakan Presiden RI pada saat itu mengeluarkan pernyataan bahwa, gerakan PKI yang dipimpin oleh Moeso di Madiun harus segera ditumpas. Pernyataan tersebut kemudian diteruskan kepada Jendral Sudirman yang kemudian memberikan perintah yaitu, ditunjuknya Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur, Menugaskan Brigade 13 untuk menyerbu Madiun dan menghancurkan PKI. Pada tanggal 25 September 1948, ketua Mobile Brigade meninggalkan Nganjuk dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan pemberontak. Di esok harinya, pasukan Brigade dapat memukul mundur para pemberontak dan juga berhasil merebut kembali desa Goyangan dan Desa Bogor (Nugraha, Mulyana, & Iriyadi, 2018).

Sebenarnya PKI sudah menunjukkan gelagat mencurigakan serta berpotensi akan melakukan pergerakan berbahaya yang bertentangan dengan ideologi Indonesia. Hal itu berhasil terbukti dengan pemberontakan PKI yang sempat terjadi di Madiun. Pemberontakan itu pecah pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa ini dikomandani Musso dengan tujuan mengganti ideologi Pancasila menjadi Komunis. Musso beserta rombongan berhasil menguasai Madiun selama 13 hari. Untungnya pemberontakan ini berhasil dilumpuhkan pada tanggal 1 Oktober 1948.

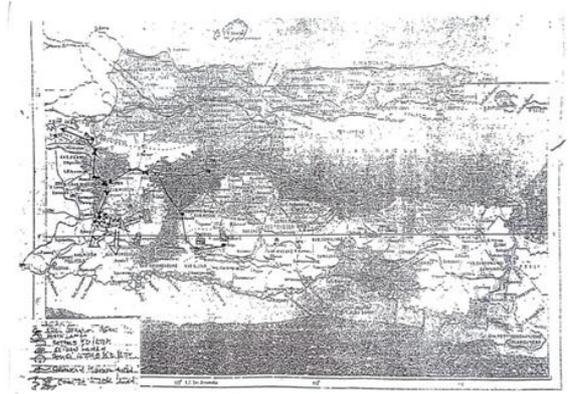
Rute gerakan:

Kota Maesan, Bondowoso - Jember - Kulaka - Probolinggo - Pasuruan - Lawang - Malang dan berakhir di Kepanjen.

Selanjutnya dari Kepanjen MBK Besuki harus melakukan persiapan serta menjemput kekuatan tambahan dari Karesidenan di Malang yang dibawah Komandan MBK Malang. Samsu Mertojoso dan pasukan diangkut ke lokasi evakuasi Perkebunan Sumbermanjing Wetang di Malang Selatan. Nah, setelah tugas itu selesai maka karesidenan Besuki melanjutkan perjalanan menuju Blitar sekaligus mendirikan kantor sementara (Tim Peneliti Kepolisian Jember, 2007).

Setelah tugas di Blitar selesai kepolisian ini harus dipindahkan ke Desa Sendung di kota Wlingi. Pindahan itu terjadi karena akan dilakukan pembubaran kantor darurat Kepolisian Karesidenan Besuki di Blitar sebagai bagian dari pemerintah Karesidenan Besuki. Misi lanjutan yang ditugaskan kepada Batalyon III MBB Jatim adalah pengamanan di kawasan status quo CCPK/IV a di Tajinan, Malang Selatan. Penugasan ini berlangsung hingga menjelang penugasan operasi PKI Moeso di Madiun. Pelaksanaan operasi penumpasan diawali dari kota Nganjuk yang

terlebih dahulu dibebaskan satuan tentara/Divisi Brawijaya (Tim Peneliti Kepolisian Jember, 2007).



Gambar 2. Peta Hijrah Brimob dari Blitar-Madiun-Ponorogo.

Sumber: Koleksi BRIMOB Karesidenan Besuki, Dikelola oleh Laboratorium Sejarah Dewan Harian Daerah 45 Surabaya

Rute gerakan:

Nganjuk - Bagor - Wilangan - Saradan - Caruban - Balerejo - Madiun kota Timur-berlanjut Dlopo - Kanten dan berakhir di Ponorogo.

Lalu dalam perjalanan menuju kota Madiun, tepatnya di Balerejo gerakan dihentikan atas perintah. Satuan dari sebelah Barat kota Madiun/Siliwangi bergerak untuk merebut kota, karena pemberontak berencana menghancurkan rumah penjara dengan para pejuang di dalamnya. Satuan Tugas Mobile Brigadir yang berjarak 20 km dari Madiun juga berhenti dan bergabung dengan Siliwangi untuk merebut kota Madiun, terutama rumah penjara yang hanya berjarak 10 km dari kota (Tim Peneliti Kepolisian Jember, 2007).

Musso meninggalkan pasukan inti PKI dan pergi ke Pacitan. Akibat dari keadaan yang tidak jelas, Musso kehilangan kontak di sekitar Pacitan. Pada 15 Oktober, laju dari gerakan Siliwangi membuat Musso melarikan diri ke arah utara kembali ke jurusan Ponorogo. Namun tidak ada lagi yang tersisa, jumlah dari pasukannya pun semakin sedikit (Poeze, 2011).



Gambar 3. Jasad Musso, Pemimpin Pemberontakan PKI yang tertembak di mati di Sumandang, Ponorogo pada 31 Oktober 1948

Sumber: Madiun 1948: PKI Bergerak

Tanggal 31 Oktober merupakan akhir dari kisah Moeso. Terdapat beberapa gambaran peristiwa mengenai tewasnya Musso, tetapi inti pokoknya tetap sama. Terdapat keterangan ringkas mengenai tewasnya Musso di dalam telegram pada 2 November dari Soengkono Kepada Soekarno. Dalam telegram tersebut disebutkan bahwa pada tanggal 31 Oktober sekitar pukul 11.00 Musso sudah dibunuh di Sumanding, Sumoroto. Disebutkan dalam berita tersebut yang diberitakan pada pukul 10.00 dan 11.00 pagi hari, bahwa terjadi tembak-menembak antara TNI dengan dua orang pemberontak yang bersenjata pistol, serta tiga pengawal mereka dengan

senjata yang lengkap lengkap. Pemberontak tersebut menolak untuk mengangkat tangan dan tembak-menembak pun berlanjut. Akibat dari tembak-menembak itu seorang prajurit TNI tertembak pada dagu dan salah seorang dari pemberontak tersebut yang merupakan pimpinan pemberontak tewas, dan dua pengawal lainnya melarikan diri. Mayat dari pemberontak tersebut dibawa ke rumah sakit Ponorogo. Menurut pernyataan dari perwira-perwira TNI yang dipanggil saat itu, pemberontak yang tewas tersebut ialah Musso (Poeze, 2011).

Terdapat pernyataan lain yang dianggap benar tentang tewasnya Musso. Pernyataan ini diberikan oleh Soewarno yang merupakan seorang pegawai yang pada saat itu sedang berdinas di daerah Jebeg pada tanggal 31 Oktober. Dijelaskan pada pukul 08.00 pagi di depan pos Kesehatan Balong, yang mana pada saat itu Soewarno sedang berbincang dengan seorang polisi, Redjosudarmo. Terlihat seorang berbadan agak gemuk, memakai celana hitam yang dijinjing dan memakai baju kaos, memakai capil dan mencangklongkan sarung di pundaknya. Soewarno memanggilnya untuk diperiksa tasnya. terdapat ikat kepala dan jas hujan dalam tas tersebut. Kemudian Soewarno meminta orang tersebut untuk menunjukkan surat jalannya. Ketika Soewarno mengamati surat jalan tersebut, orang tersebut mengambil kembali tas bawaannya, dan ditembaknya Soewarno. Namun, tembakan tersebut meleset mengenai dua kali. Soewarno berlari sambil berteriak yang menyebabkan sejumlah orang yang berada di persimpangan jalan tersebut datang menghampiri. Beberapa dari orang tersebut membawa Redjosudarmo ke pos Kesehatan dan beberapa lainnya mengejar penembak tersebut. Soewarno memberitahu kepada pimpinan polisi di Ponorogo dan kemudian membawa Redjosudarmo ke rumah sakit di Ponorogo. Namun, pada malam itu juga Redjosudarmo meninggal diakibatkan luka tembak yang parah. Pengejaran tersebut masih berlanjut. Penembak tersebut sempat membajak dokar, dan dikejanya dengan sepeda. Bantuan tentara juga diserukan untuk membentuk pengejaran tersebut. Pukul 12.00 terdapat kabar bahwa penembak tersebut sudah tertangkap dan mengaku ialah Musso. Tidak lama kemudian ia berusaha untuk kabur lagi, namun ia ditembak mati oleh tentara (Poeze, 2011).



Gambar 4. Foto Amir Bersama Pemimpin PKI yang tertangkap

Sumber: Madiun 1948: PKI Bergerak

Tewasnya Musso pada 31 Oktober 1948 telah mengakhiri juga pemberontakan saat itu. Ia tewas setelah delapan puluh hari menjadi pemimpin PKI. Setelah Musso tewas, pada tanggal 1 Desember 1948, Pasukan Siliwangi berhasil menangkap Amir dan tentara yang jumlahnya kurang lebih 300 orang. setelah ditangkap, Amir kemudian dibunuh bersama dengan para pemimpin lainnya. Sekitar 35.000 orang ditangkap dalam aksi pemberontakan PKI tersebut (Nugraha, Mulyana, & Iriyadi, 2018)

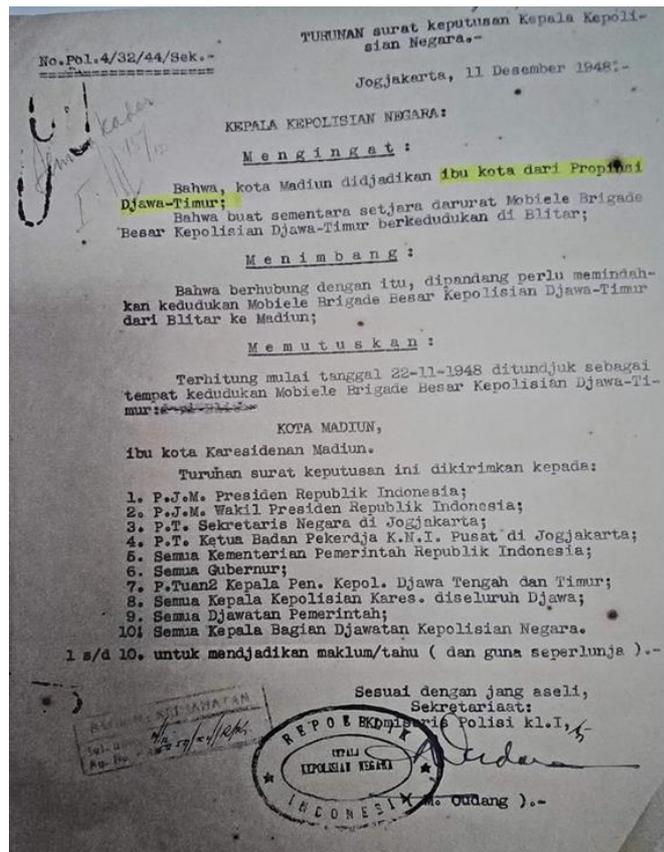
Dampak Madiun Affair terhadap Kepolisian Madiun

1. Pemindahan Markas Brimob

Dalam tahun 1948 terjadi banyak kekacauan yang memaksa dan mengharuskan Brimob cukup banyak ikut andil dalam mengamankan keadaan di beberapa kota di Jawa Timur. Mungkin setelah melihat performa Brimob maka pemerintah mengikutsertakan Brimob dalam menjaga keamanan di Kota Madiun.

Bahkan, sebagai tanggapan peristiwa pemberontakan yang PKI perbuat di Madiun Pemerintah Indonesia mengambil tindakan berupa pemindahan Mobile Brigadir Besar Kepolisian Jawa Timur. Hal itu terlampir dalam arsip yang bersumber dari ANRI yang berisi sudah terjadi pemindahan ibu kota Jawa Timur dari Surabaya menjadi Madiun serta secara darurat Mobile Brigadir Besar Kepolisian Jawa Timur yang berkedudukan di Blitar. Maka Kepala Polisi Negara menganggap perlu juga melakukan pemindahan Mobile Brigadir Besar Kepolisian Jawa Timur dalam situasi darurat yang berkedudukan sementara di Blitar ke Madiun yang mulai berlaku sejak tanggal 22 November 1948.

Dalam arsip itu menunjukkan adanya peristiwa lain yang menyebabkan pemindahan ibukota Jawa Timur yaitu peristiwa Agresi Militer I oleh Belanda. Mengetahui Kota Madiun sudah diputuskan sebagai ibukota Jawa Timur menggantikan Kota Surabaya, hal ini menjadi salah satu alasan PKI melakukan pemberontakan di Kota Madiun.



Gambar 5. Pemindahan Markas Brimob dari Blitar ke Madiun
 Sumber: Arsip Kepolisian Negara, Koleksi ARSIP Nasional Republik Indonesia

2. Laporan Pasca Madiun Affair

Bersumber dari arsip ANRI yang memuat pemaparan dan deskripsi situasi kota Madiun setelah peristiwa Madiun Affair yang pecah pada tanggal 18 September 1948. Meskipun masih dalam situasi yang menegangkan dan was-was akan menjadi korban, anggota kepolisian harus tetap berkeliling dan memantau keadaan kota madiun. Dalam hal ini menjaga sikap tenang dan tidak panik menjadi pegangan utama saat membantu menertibkan kembali keamanan dan situasi masyarakat sekitar.

Dalam keadaan kacau di Kota Madiun masih terdapat anggota kepolisian yang bersiaga dan berpatroli di sekitar Madiun yaitu Mas Abu Sumosubroto sebagai Inspektur-polisi kelas II pada jawatan kepolisian negara bagian pengusutan kejahatan di Jogjakarta yang menuliskan hasil pemantauan sementara kota Madiun dari hari Selasa tanggal 19 September 1948 sampai hari Minggu tanggal 24 September 1948.

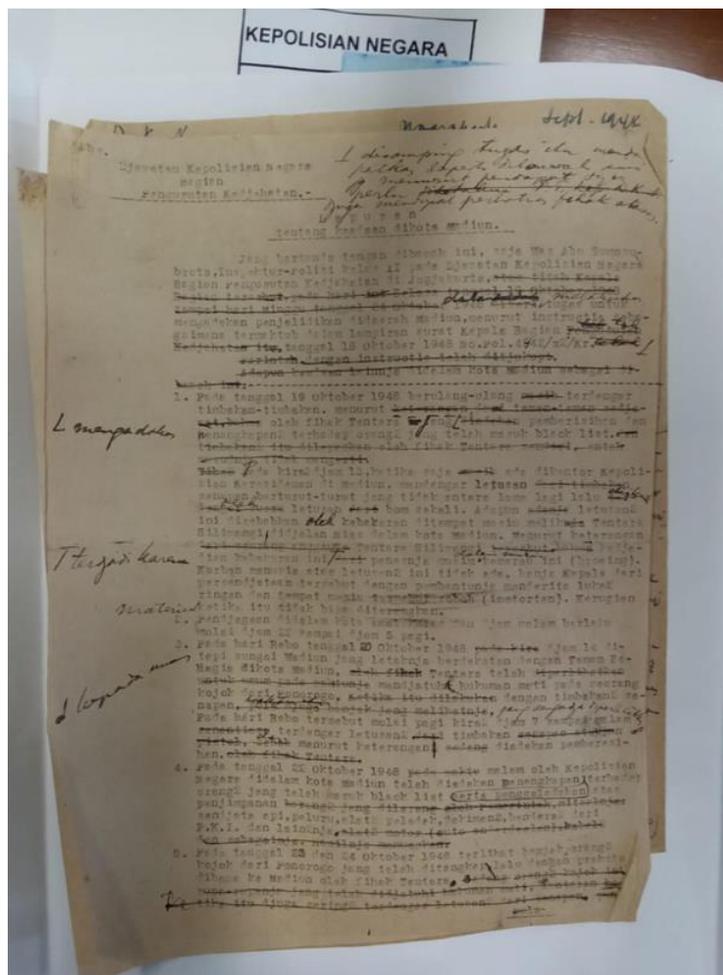
Berdasarkan hasil paparan Sumosubroto, sempat terjadi kebakaran yang menyebabkan ledakan di tempat penyimpanan mesiu milik Tentara Siliwangi yang berlokasi di Jalan Nias

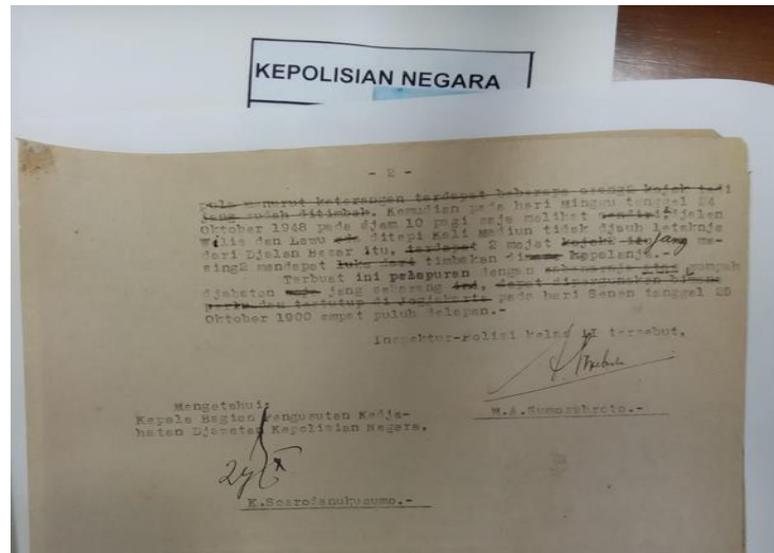
dalam kota Madiun. Kebakaran itu diduga karena kondisi musim kemarau yang sangat ekstrim. Selanjutnya secara garis besar, selama enam hari terjadi pembersihan orang-orang yang dianggap mengepal pemberontakan Madiun oleh tentara yang eksekusinya dilakukan di depan masyarakat ramai. Dalam upaya mengembalikan keamanan maka terdapat pemberlakuan jam malam mulai pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi.

Selama penangkapan juga dilakukan penyitaan barang-barang yang dilarang dan dianggap ilegal untuk dimiliki warga sipil yaitu senjata api, alat peledak, dokumen-dokumen, bendera-bendera yang memiliki lambang PKI, alat-alat motor serta kabel dan lain lain yang penangkapan dan pembersihan ini dianggap memuaskan.

Pelaku yang sempat menyelamatkan diri ke Ponorogo juga ditangkap dan dibawa ke Madiun bersama Prahoto oleh pihak tentara. Sumosubroto dengan mata kepala sendiri melihat dua mayat pelaku di Jalan Wilis dan Lawu di tepi kali Madiun. Terdapat luka tembakan di kepala yang menunjukkan cara pihak tentara dalam mengeksekusi kedua pelaku.

Demikianlah isi laporan keadaan kota Madiun setelah terjadinya Madiun Affair. Terbayang betapa mencekamnya situasi di madiun saat harus mendengar suara tembakan-tembakan serta menonton langsung eksekusi di tempat umum. Tapi hal-hal itu perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi anggota pemberontak yang akan memulai serangan balasan dengan mengeksekusi orang-orang yang dianggap berperan penting dalam Madiun affair akan melumpuhkan PKI serta memperkecil adanya serangan lanjutan. Tapi ditakutkan adanya serangan balasan dari pihak PKI, mungkin masih ada yang berkeliaran bebas dan menunggu untuk melakukan serangan.





Gambar 6. Lanjutan Keadaan Laporan 1948

Sumber: Arsip Kepolisian Negara, Koleksi ARSIP Nasional Republik Indonesia

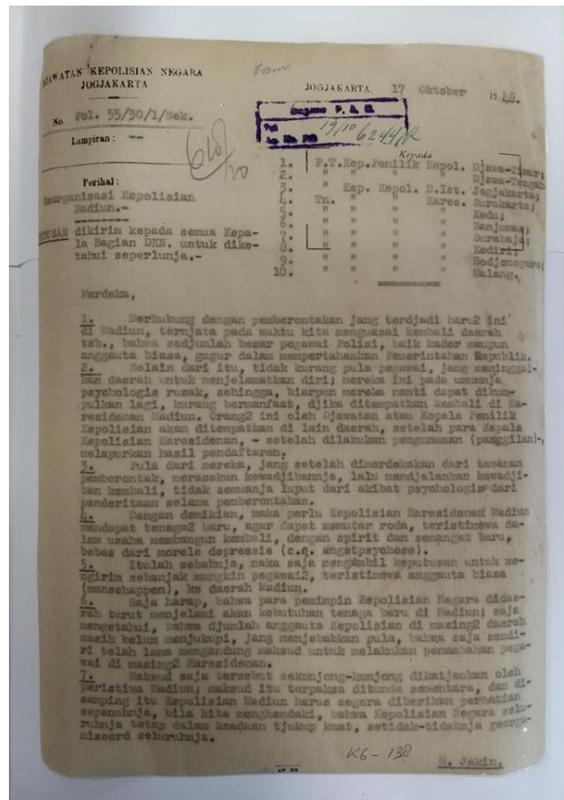
3. Reorganisasi Kepolisian Madiun Pasca Madiun Affair 1948

Selanjutnya dalam arsip lain masih bersumber dari ANRI disebutkan bahwa pada saat pemberontakan banyak korban jiwa dari anggota karesidenan Madiun. Tak hanya itu terdapat anggota karesidenan yang selamat dan memilih untuk melarikan diri dari Madiun. Kabar buruknya banyak yang masih mengalami gangguan psikologis berupa trauma. Sehingga terdapat himbuan bagi karesidenan dari daerah lain di Jawa Timur untuk mengirim bantuan anggota tambahan bagi karesidenan di Madiun.

Sementara anggota karesidenan Madiun yang mengalami trauma dihimbau untuk bertugas di karesidenan lain. Himbuan itu dilakukan dengan anggapan bahwa anggota karesidenan Madiun yang masih mengalami trauma tidak akan memberi kontribusi yang terlalu baik dalam mengamankan pemberontakan di Madiun. Sehingga hal itu mengharuskan terjadinya Reorganisasi Kepolisian Madiun.

Dalam arsip itu juga menyinggung tentang penguatan dan penambahan jumlah anggota karesidenan yang direncanakan akan dilakukan bila keadaan sudah membaik. Sebenarnya ada kekhawatiran jika melakukan pemanggilan dan pemusatan banyak anggota karesidenan ke Madiun akan membuat kekurangan anggota di masing-masing daerah yang malah memantik pemberontakan berskala kecil.

Tapi mengingat situasi Kota Madiun yang sedang kacau dan tidak kondusif maka saat ini karesidenan di Kota Madiun menjadi prioritas dan harus segera dilakukan perombakan organisasi karesidenan agar sesegera mungkin setelah perombakan akan langsung membagi tugas pengamanan di Kota Madiun.



Gambar 7. Reorganisasi Kepolisian Madiun Pasca Madiun Affair 1948
 Sumber: Arsip Kepolisian Negara, Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia

SIMPULAN

Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan yang menunjukkan dinamika politik, ideologi, dan keamanan negara yang penuh tantangan. Kepolisian, khususnya Mobile Brigade (Brimob), memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan selama dan setelah pemberontakan. Melalui patroli, operasi militer, dan reorganisasi, Brimob dan kepolisian berhasil mengembalikan ketertiban di wilayah Madiun. Proses ini tidak hanya melibatkan tindakan represif terhadap pemberontak tetapi juga pengamanan masyarakat sipil dalam situasi yang penuh ketegangan. Pasca-pemberontakan, reorganisasi di tubuh kepolisian menjadi langkah strategis untuk memulihkan struktur organisasi yang terdampak. Penambahan personel dari wilayah lain serta penyesuaian struktural dilakukan untuk memastikan keberlanjutan keamanan. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya peran polisi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara di tengah ancaman ideologi yang bertentangan dengan prinsip dasar bangsa. Peristiwa Madiun Affair menjadi pengajaran akan pentingnya sinergi antar lembaga negara dalam menghadapi ancaman yang bersifat multidimensi. Selain itu, pengalaman ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat kapasitas institusi kepolisian sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat dalam konteks sejarah bangsa yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian terutama kepada Komunitas Pelestari Sejarah Madiun Raya (KOMPAS MADYA) atas dukungan fasilitas serta pendanaan selama berlangsung penelitian hingga publikasi hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, M. R. dkk. (2024). Musso's Role in the PKI Rebellion in Madiun in 1948. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Volume 12 Nomor 2, 505-516.

- Beradiansyah. 2023. Jejak Sejarah Perjuangan Satuan Brimob Polda Jambi Di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Salim Media Indonesia.
- Besuki, T. P. (2007). Kesatuan Kepolisian Karesidenan Besuki Yang Dimotori Mobile Brigade Karesidenan Besuki (M.B.K. BESUKI) Dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Periode Tahun 1945/1949. Jember: Kantor Kepolisian Jember.
- Danoekoesomo, S. (1997). Hari-hari Bahagia Bersama Rakyat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dewan Harian 45. (1982). Album Perang Kemerdekaan 1945-1980. Alda.
- Efimova, L. (2003). Who gave instructions to the Indonesian communist leader Musso in 1948?. *Indonesia and the Malay World*, 31(90), 171-189.
- Fahrurodji, A. (2017). Dari Druzhba ke Mirnoye Sosushyestvovaniye: Diplomasi Uni Soviet-Indonesia dalam Era Stalin dan Krushev, 1945-1964. *Jurnal Sejarah*, Volume 1 Nomor 1, 121-146.
- Foto Patroli Kepolisian di Area Madiun tahun 1948. Koleksi Indonesian Press Photo Service (IPPHOS). Dikelola oleh Laboratorium Sejarah Dewan Harian Daerah 45 Surabaya.
- Gottschlak, L. (2008). Mengerti sejarah. Penerjemah: Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Iryana, W., & Mustofa, M. B. (2021). Histografi Perjuangan Pasukan Siliwangi Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949. *JAWI*, 4(1), 17-39.
- Jasin, M. (2013). Memoar Jasin sang polisi pejuang : meluruskan sejarah kelahiran polisi Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kamal, N. (2018). Gatot Subroto: Peran Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*. Volume 3 Nomor 2, 147-160.
- Kamal, N. (2018). Gatot Subroto: Peran Dalam Penumpasan Pemberontakan Pki Di Madiun Tahun 1948. *Ilmu Sejarah-S1*, 3(2).
- Kasdi, D. A. (1986). Pertempuran 10 November 1945: citra kepahlawanan bangsa Indonesia di Surabaya. Panitia Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 10 November 1945.
- Kasdi, D. A. (2010). 500 km: Sebuah Nilai Perjuangan Tanpa Angka. Malang. An-Nuha Publishing.
- Laporan Keadaan Peristiwa Madiun 1948. Koleksi ARSIP Nasional Republik Indonesia. Arsip Kepolisian Negara.
- Lebra, J. (1988). Tentara gemblengan Jepang. Jakarta: Pustaka Hikmah Harapan
- Moustakas, C. E. (1990). Heuristic research: Design, methodology, and applications. Sage Publications, Inc.
- Nugraha, A., Mulyana, A., & Iriyadi, A. (2018). Peranan Brigade Mobile dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia tahun 1946-1949. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. Volume 7 Nomor 1, 21.
- Nugraha, R. C. & Winarti, M. (2018). Kiprah Divisi Siliwangi Dalam Menghadapi Pemberontakan Pki Madiun Tahun 1948. *Factum*. Volume 7 Nomor 2, 215-226.
- Nugraha, R. C., & Winarti, M. (2018). Kiprah Divisi Siliwangi Dalam Menghadapi Pemberontakan Pki Madiun Tahun 1948. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 215-226.
- Pemindahan Markas Brimob dari Blitar ke Madiun. Koleksi ARSIP Nasional Republik Indonesia. Arsip Kepolisian Negara.
- Peta Hijrah Brimob dari Blitar-Madiun-Ponorogo. Koleksi BRIMOB Keresidenan Besuki. Dikelola oleh Laboratorium Sejarah Dewan Harian Daerah 45 Surabaya.
- Poeze, H. A. (2011). Madiun 1948: PKI Bergerak . In H. A. Poeze, Madiun 1948: PKI Bergerak (p. 249). Jakarta: SNS Reaal Fonds.
- Reiner. G.J. (1961). History: Its Purpose and Method. Allen and Unwin.
- Reorganisasi Kepolisian Madiun Pasca Madiun Affair 1948. Koleksi ARSIP Nasional Republik Indonesia. Arsip Kepolisian Negara.
- Soedarmo, R. (2014). Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965). *Jurnal Artefak*. Volume 2 Nomor 1, 129-138.
- Suparmin, D. H. (1985). Lintasan Perjalanan Kepolisian RI Sejak Proklamasi - 1950. Jakarta: PT. GPM.
- Swift, A. (2010). The road to Madiun: The Indonesian communist uprising of 1948. Equinox Publishing.

Yauwerissa, L. (2013). Pasukan Polisi Istimewa Prajurit Istimewa dalam Perjuangan Kemerdekaan di Jawa Timur. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.